

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 24 Desember 2014

Subyek : Longsor

Hal : 13

LUMPUR LAPINDO

## Perlawanan "Sesek" Bambu Korban

HARI masih pagi saat warga korban lumpur Lapindo dari empat desa, yakni Desa Renokenongo, Jatirejo, Siring di Kecamatan Porong dan Desa Kedungbendo di Kecamatan Tanggulangin, berdatangan di titik 42 tanggul Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (19/12). Mereka berkumpul di tepi tanggul bersiap menghadang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang kabarnya hendak melakukan aktivitas di lokasi itu.

Kaum ibu dan bapak berbaris di dekat dinding anyaman (sesek) bambu yang dipasang di tengah tanggul sebagai penutup jalur lalu lintas pekerja penanggulangan lumpur. Anyaman bambu itu menjadi benteng pertahanan warga yang belum menerima hak penggantian lahan yang kini terkubur lumpur.

"Kami berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang mengabulkan permohonan warga korban lumpur. Kami mendengar dana pembayaran ganti rugi diusulkan dalam APBN 2015. Namun, kami lebih senang jika ada keputusan tertulis," ujar Sudibyo, koordinator warga dari Desa Renokenongo.

Peraturan presiden ini dinilai sebagai jaminan tertulis. Selama belum ada pernyataan tertulis, warga bersikeras mempertahankan tanggul yang tanahnya masih milik mereka. Perlawanan ini seolah mengingatkan pada awal pemberontakan petani Banten 126 tahun lalu. Sebuah perlawanan ideologis yang lahir dari penihilan hak-hak dasar rakyat. Inilah manifestasi politik ekologi warga untuk menciptakan daya tawar guna penyelesaian hak.

Jika tawaran negosiasi tidak bersambut, anarki adalah kanal terakhir untuk menumpahkan kemarahan. Sejarah kekerasan di negeri ini bisa semakin panjang. Rasa frustrasi yang menjadi katalis kemarahan sudah menjangkiti warga karena aksi-aksi sebelumnya tak diindahkan.

Awalnya, pada April 2008, warga Renokenongo menghalangi BPLS membangun tanggul 1,5 kilometer dengan tinggi 11 meter di sisi timur. Tanggul yang membentang dari Renokenongo hingga Glagaharum itu untuk melapis jika tanggul utama jebol. Warga tak mengizinkan BPLS melakukan aktivitas apa pun di atas lahan mereka sebelum penggantian lahan yang tenggelam akibat semburan lumpur Lapindo.

BPLS tak kuasa melawan warga, kecuali ada dukungan aparat keamanan. Seperti pada 2 Desember lalu saat BPLS yang dikawal aparat TNI dan Polri membongkar blokade warga untuk membangun tanggul baru di titik 73. Sejumlah alat berat, seperti backhoe, naik di tanggul 21 Desa Siring dan sejumlah kapal keruk dioperasikan.

Kepala Bagian Operasional Polres Sidoarjo Ajun Komisaris Nur Halim mengatakan, 410 polisi dari berbagai satuan, termasuk Brimob, dikerahkan menjaga tanggul. Kehadiran aparat membuat korban tidak berdaya. Mereka sadar, tak mungkin melawan senjata, persis seperti prinsip Che Guevara, "Revolusi tanpa senjata? Takkan berhasil".

Namun, masih ada jalan lain, tanpa revolusi senjata, yaitu mendesak wakil rakyat di DPRD Sidoarjo menyuruh BPLS menyetop pembangunan tanggul baru. Warga mendesak revolusi mental.

### Seperti diadu domba

Banjir lumpur besar akibat tanggul jebol memang belum terjadi. Namun, kebocoran tanggul di titik 73B di sisi utara telah merendam rumah warga Desa Kedungbendo dan Gempolsari. Luberan lumpur juga mencemari Kali Ketapang. Air sungai menjadi asin dan merusak tanaman padi serta mematikan udang vaname di tambak milik warga di Desa Penatarsewu di hilir Kali Ketapang.

Ancaman semakin besar karena titik 68 Desa Gempolsari, yang sejajar dengan tanggul 73, kritis dan berkali-kali jebol. Ditambah titik 33 dan 34 di Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon, yang kritis karena volume air kolam penuh. "Kami seperti diadu domba. Antarwarga jadi saling menyalahkan. Mereka menuntut penggantian lahan dibayar, sedangkan warga kami sawah dan tambaknya rusak karena lumpur Lapindo masuk ke Kali Ketapang dan Kali Alu," ujar Sekretaris Desa Penatarsewu Heriyanto.

Warga memahami penderitaan korban lumpur Lapindo. Mereka berharap pemerintah segera memfasilitasi warga korban lumpur supaya haknya segera dibayar PT Minarak Lapindo Jaya selaku juru bayar PT Lapindo Brantas Inc. Jika hak korban lumpur dilunasi, luapan lumpur dan air asin ke Kali Ketapang bisa dicegah karena BPLS bisa leluasa bekerja.